

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA DINAS KEUANGAN SE-
EKS KARESIDENAN SURAKARTA)**

Nadia Fira Arfiyanti ¹⁾

Suharno ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail: ¹⁾ nadiafira804@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of local revenue (PAD), general allocation funds (DAU), and revenue sharing (DBH) on capital expenditures in local governments. This study uses a sample of non-probability sampling with saturated sampling technique so that it gets a sample at the Department of Finance of the entire Surakarta Residency. The samples in this study were 7 regions covering 1 Praja City (Surakarta) and 6 districts (Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten and Boyilali) using agency theory. The type of data used is secondary data. The results of this study indicate the significance value of Regional Original Income (PAD) of $0.001 < 0.05$, it can be explained that PAD has a significant effect on capital expenditure. The significance value of the General Allocation Fund (DAU) of $0.006 < 0.05$, it is explained that the DAU has a significant effect on capital expenditure. The significance value of Revenue Sharing (DBH) is $0.429 > 0.05$, it can be explained that DBH has no effect on capital expenditure. The coefficient of determination shows an Adjusted R Square of 0.332, the effect of the independent variables, namely Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Profit Sharing Fund (DBH) on Capital Expenditure by 33.2% while the rest (100%) - 33.2% = 66.8% influenced by other variables not studied.

Keywords: Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Profit Sharing Fund (DBH), and Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk biaya pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian serta pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang memiliki nilai manfaatnya melebihi batas 12 (dua belas) bulan digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya (Darise 2008: 141). Belanja modal mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah. Ketika menganggarkan belanja, kepala daerah cenderung mengusulkan jumlah atas kebutuhan yang sesungguhnya. Kepala daerah lebih menyukai besaran alokasi yang melebihi *real cost* saat anggaran belanja disusun (Abdullah dan Nazry, 2015). Sehingga mengakibatkan perbedaan ketika terealisasi dan menimbulkan selisih (varian). Jika realisasi

belanja modal lebih kecil dari anggaran menimbulkan varian yang diharapkan (*vafourable variance*), maka kinerja pemerintah akan dinilai baik karena terjadi efisiensi anggaran, dan sebaliknya jika realisasi lebih besar dari anggaran menimbulkan varian yang tidak diharapkan (*unvafourable variance*), maka kinerja pemerintah akan dianggap buruk karena penganggaran yang tidak tepat (Mahmudi, 2006: 157).

Peran Anggaran Belanja Modal terhadap Pemerintah Daerah ini merupakan sebuah proses yang sangat penting untuk kepentingan politis. Anggaran belanja modal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefe dan Khemani, 2003; Ablo dan Reinikka, 1998). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengatakan ada kendala pertumbuhan belanja modal pemerintah yang hanya berada di kisaran 4,1 persen sejak periode 2014-2019. Padahal tahun 2015, pemerintah mulai mengalihkan belanja untuk subsidi energi untuk belanja produktif. Pemindahan dana subsidi untuk belanja produktif merupakan langkah awal bagaimana pemerintah menyusun belanja modal. Pemerintah tetap perlu menyeimbangkan anggaran dengan kemampuan fiskal. (<http://m.liputan6.com/bisnis/read/3999627/belanja-modal-pemerintah-hanya-tumbuh-4-persen-selama-5-tahun>).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu atau lebih (*principal*) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Kaitan *agency teory* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (*principal*) dengan pemerintah daerah (agen).

2. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007, belanja modal merupakan pengeluaran anggran yang digunakan pada rangka untuk memperoleh dana menambah asset tetap atau asset lainnya dalam memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pengeluaran untuk biaya yang melebihi batas waktu kapitalisasi asset atau asset lainnya yang diterapkan oleh pemerintah. Halim dan Kusufi (2012: 107) mengklafikasikan belanja modal sebagai berikut: Belana Tanah, Belanja modal peralatan atau mesin, Belana modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Bangunan atau Gedung, Belanja Modal Fisik lainnya merupakan biaya/ pengeluaran yang difungsikan sebagai pengadaan

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

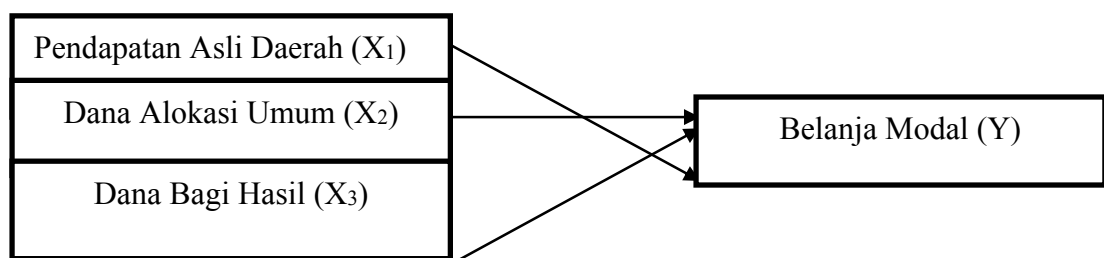
Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum di ataur berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP nomor 55 tahun 2005, dijelaskan bahwa:

- Dana Alokasi Umum di alokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
- Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatann dalam negeri neto.
- Proporsi Dana Alokasi Umum antara propinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota.

5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Model dan Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah (Y)

H₂ : Dana Alokasi Umum (X₂) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah (Y)

H₃ : Dana Bagi Hasil (X₃) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah (Y)

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Se-Eks Karesidenan Surakarta yang meliputi 1 Kota Praja (Surakarta) dan 6 Kabupaten (Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali), sehingga daerah total populasi adalah 7 daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik.

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal di Karesidenan Surakarta yang meliputi 1 Kota Praja (Surakarta) dan 6 Kabupaten (Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali), sehingga daerah total populasi adalah 7 daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2014-2018, dengan jumlah sampel sebanyak 7 Kabupaten/Kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik sampling jenuh, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2014-2018, dengan jumlah sampel sebanyak 7 Kabupaten/Kota.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan meliputi pengujian uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa semua variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), dan Dana

Bagi Hasil (X₃) menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance value* (0,559; 0,735; 0,609) > 0,10 dan nilai VIF (1,790; 1,360; 1,643) < 10.

Berdasarkan uji autokolerasi menunjukkan *Runs Test* menggunakan program SPSS menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,735 > 0,05, hal ini berarti antara residual tidak terdapat hubungan kolerasi atau lolos uji autokolerasi.

Berdasarkan uji heteroskedasititas menunjukkan menggunakan program SPSS menunjukkan *p-value* variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁) sebesar 0,175, Dana Alokasi Umum (X₂) sebesar 0,291, dan Dana Bagi Hasil (X₃) sebesar 0,082, hal ini menunjukkan semua variabel memiliki *p-value* > 0,05 berarti model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedasititas, atau lolos uji heteroskedasititas.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Kolmogrov-Smirnov tes* (K-S) diperoleh nilai sebesar 0,693 berarti > 0,05. Ho diterima artinya data residual terdistribusi normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂) dan Dana Bagi Hasil (X₃) terhadap Belanja Modal (Y).

TABEL 1
HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1					

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel XII maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -128150298155,514 + 0,650X_1 + 0,304X_2 - 0,385X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah:

a: -128150298155,514(negatif)

artinya jika X₁ (Pendapatan Asli Daerah (PAD))= 0, X₂ (Dana Alokasi Umum (DAU))= 0 dan X₃ (Dana Bagi Hasil (DBH))= 0 maka Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) adalah negatif Rp.128.150.298.155.

β₁: Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp.1 maka Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) akan meningkat sebesar Rp.0,650, sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun sebesar Rp.1 maka Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) akan menurun sebesar Rp.0,650, dengan

asumsi variabel X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) dan X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) konstan/tetap.

- β₂: Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar Rp.1,- maka Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) akan meningkat sebesar Rp.0,304 sebaliknya jika Dana Alokasi Umum (DAU) menurun sebesar Rp.1 maka Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) akan menurun sebesar Rp.0,304, dengan asumsi variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) dan X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) konstan/tetap.
- β₃: Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat sebesar 1%, maka Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) akan menurun sebesar Rp.0,385, sebaliknya jika Dana Alokasi Umum (DAU) menurun sebesar 1%, maka Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) akan meningkat sebesar Rp.0,385, dengan asumsi variabel X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) dan X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) konstan/tetap.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian Uji t menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 2 HASIL UJI t
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-1,091	,283
	PAD	3,728	,001
	DAU	2,927	,006
	DBH	-,801	,429

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

- a. Uji t variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) diperoleh nilai p-value (signifikansi)= 0,001 < 0,05 maka H₀ ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) terhadap Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah).

Kesimpulan H1: yang menyatakan bahwa X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) berpengaruh signifikan terhadap Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) terbukti kebenarannya.

- b. Uji t variabel Dana Alokasi Umum (X2) diperoleh nilai p-value (signifikansi)= 0,006 < 0,05 maka H₀ ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) terhadap Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah). Kesimpulan H2: yang menyatakan bahwa X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) berpengaruh signifikan terhadap Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) terbukti kebenarannya.

- c. Uji t variabel Dana Bagi Hasil (X3) diperoleh nilai p-value (signifikansi)= 0,429 > 0,05 maka H₀ diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan

X3 (Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah). Kesimpulan H3: yang menyatakan bahwa X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) berpengaruh signifikan terhadap Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah) tidak terbukti kebenarannya.

Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel terikat yang diuji pada tingkat 0,05 (Ghozali, 2016). Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Prosedur uji F ini adalah :

a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti tidak ada pengaruh X_1, X_2, X_3 , secara bersama-sama terhadap Y

b. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti ada pengaruh X_1, X_2, X_3 , secara bersama-sama terhadap Y

TABEL 3 HASIL UJI F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	9994008036446	3	3331336012148	6,637	,001 ^b
		6340000000,000		8782000000,000		
1	Residual	1555955747991	31	5019212090295		
		72000000000,000		871000000,000		
	Total	2555356551636	34			
		38330000000,000				

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji pada tabel, maka ditunjukkan sebagai berikut:

a. Menyusun hipotesis nilai (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ berarti model tidak tepat dan tidak layak digunakan untuk memprediksi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah (Y).

$H_0: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti model tepat dan layak digunakan untuk memprediksi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah (Y).

b. *Level of significance*, yaitu $\alpha = 0,05$ atau 5%

c. Kriteria Pengujian

H_0 diterima bila $p \text{ value} > 0,05$ dan H_0 ditolak bila $p \text{ value} < 0,05$

d. Kesimpulan

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 6,637 dengan nilai signifikansi (p value) sebesar 0,001 < 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model tepat dalam memprediksi pengaruh X_1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)), X_2 (Dana Alokasi

Umum (DAU)) dan X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) terhadap Y (Belanja Modal pada Pemerintah Daerah)

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2006) Koefisien Determinan (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel bebas.

TABEL 4 HASIL KOEFESIEN DETERMINASI
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,625 ^a	,391	,332	70846397863,94133

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa hasil pengujian menggunakan koefisien determinasi diperoleh perhitungan *Adjusted R Square*= 0,332 hal ini berarti pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 33,2% sedangkan sisanya $(100\%-33,2\%)= 66,8\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti dana perimbangan, dana alokasi khusus, pajak daerah, dan lain-lain.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis t sebesar 3,728 dengan p-value sebesar $0,001 < 0,05$ berarti ada pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal (Y) pada pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah” terbukti kebenarannya. Artinya berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Hal ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Belanja Modal (Y) akan meningkat dan sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun maka Belanja Modal (Y) akan menurun. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Susanti dan Fahlevi, 2016). Hasil berbeda yang dilakukan oleh (Suryani dan Pariani, 2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis t sebesar 2,927 dengan p-value sebesar $0,006 < 0,05$ berarti ada pengaruh positif Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal (Y) pada pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Dana Alokasi

Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah” terbukti kebenarannya. Artinya berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Hal ini berarti jika Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka Belanja Modal (Y) akan meningkat dan sebaliknya jika Dana Alokasi Umum (DAU) menurun maka Belanja Modal (Y) akan menurun. Penelitian yang dilakukan oleh (Suryani dan Pariansi, 2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian (Rifai, 2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis t sebesar $-0,801$ dengan p-value sebesar $0,429 > 0,05$ berarti tidak ada pengaruh positif Dana Bagi Hasil (X3) terhadap Belanja Modal (Y) pada pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah” tidak terbukti kebenarannya. Artinya berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Hal ini berarti jika Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat maka Belanja Modal (Y) akan menurun dan sebaliknya jika Dana Bagi Hasil (DBH) menurun maka Belanja Modal (Y) akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti dan Fahlevi, 2016) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian (Rifai, 2017) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
3. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
4. Hasil pengujian koefisien determinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh sebesar 33,2% dan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti, seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan lain-lain.

SARAN

1. Untuk Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta pembuatan Peraturan Daerah yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di daerahnya. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggunakan PAD, DAU, dan DBH sebaik mungkin untuk alokasi Belanja Modal, maka peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam sumber-sumber dana harus lebih diintensifkan. Belanja Modal yang dilakukan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik dan mampu memberikan *income* bagi daerah.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah beberapa variabel yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal seperti dana perimbangan, dana alokasi khusus, pajak daerah, dan lain-lain.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian. Dengan menggunakan sampel provinsi yang ada di Indonesia. Mengingat terdapatnya 34 provinsi di Indonesia, sehingga hasil penelitiannya dapat direalisasikan terhadap pemerintah daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ramadhaniatun Nazry. 2015. "Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah- Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan". *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, 2 (2), 272-283.
- Ablo, Emmanuel & Ritva Reinikka. 1998. *Do budget really matter? Evidence from public spending on education and health care in Uganda*. World Bank, Policy Research Paper 1926.
- Baldaric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua). Yogyakarta : SSTIM YKPN
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan daerah, Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang- Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri. Jakarta Barat: Indeks.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2013. *Analisis Multivariate Dengan Program IBM 21 edisi delapan*. Semarang. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, Jakarta.
- Hermawan, David. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Penglokasian Belanja Modal. *Jurnal Riset Mahasiswa*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. *The Political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Mahmudi. 2006. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik". Yogyakarta. UPP STIM YKPNN.
- Petrie, Murray. 2002. A Framework for Public Sector Performance Contracting. *OECD Journal on Budgeting*. Vol. 2
- Polit, D. & Beck, C. (2004). *Nursing research: Principle and methods*. (7th esition). Philadelphia: J.B Lippincott Company.
- Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis (Terjemah Kawan Menyong) Salemba Empat. Jakarta.
- Rifai, A, Rahmawati. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah". *Jurnal Katalogis*.

- Vol. 5, No. 7. Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Suprayitno, Bambang. 2015. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 2, No. 1. Universitas Pancaila, Jl. Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Suryani, Febdwi dan Pariani, Eka. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di provinsi Riau". *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*. Vol. 6, No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia.
- Susanti, Susi dan Fahlevi, Heru. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Wilayah Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 1, No. 1. Universitas Syiah Kuala.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar (BAS).